

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam perkembangannya, sebuah daerah dikatakan berkembang atau maju apabila sudah mencapai tujuan yang signifikan dan relevan dengan konsep pembangunan daerah itu sendiri. Pada era reformasi seperti sekarang ini banyak gebrakan baru yang dibangun oleh pemerintah untuk melakukan perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perubahan itu dibuktikan dengan adanya reformasi baru antara hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, yang lebih dikenal dengan "Otonomi Daerah".

Otonomi daerah pada hakekatnya adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat itu sendiri. Dalam konteks demikian, pemerintah daerah dituntut untuk melaksanakan pembiayaan daerah secara mandiri. Salah satunya dengan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang menunjang peningkatan ekonomi di daerah itu sendiri. Untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah dapat dilakukan dengan menaikkan tariff pajak/retribusi, memperluas obyek pajak atau dengan pengenaan jenis pajak baru. Hal ini sejalan dengan bagaimana keadaan sosial ekonomi dan budaya masyarakat di daerah itu sendiri.

Mardiasmo dkk, (2008) menyatakan bahwa sisi pendapatan, kemampuan pemerintah daerah, dalam meningkatkan pendapatan daerahnya secara berkesinambungan masih lemah. Bahkan masalah yang sering muncul adalah

rendahnya kemampuan pemerintah daerah untuk menghasilkan prediksi pendapatan daerah yang akurat, sehingga belum dapat dipungut secara optimal.

Sebagai konsekuensi di dalam melaksanakan otonomi daerah, pemerintah kabupaten/kota dituntut untuk mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang menjadi kewenangannya. Hal ini menandakan bahwa daerah harus berusaha untuk mampu meningkatkan PAD yang merupakan tolak ukur bagi daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan otonomi daerah. Pada prinsipnya semakin besar sumbangan PAD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat.

Upaya untuk meningkatkan PAD, tentunya harus diikuti dengan peningkatan fungsi pemerintahan seperti fungsi pelayanan umum, dan kesejahteraan umum. Dengan demikian PAD meningkat harus diikuti dengan Kota yang bersih, indah dan baik kepengemrintahaan. Berdasarkan undang-undang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan balas jasa untuk membiayai pengeluaran umum, dan yang digunakan sebagai alat pencegah atau pendorong untuk mencapai tujuan yang ada di luar keuangan.

Kota Gorontalo adalah salah satu dari beberapa daerah kabupaten/kota yang ada di Provinsi Gorontalo yang saat ini masih tetap melakukan pembangunan untuk kemajuan dan perkembangannya di masa mendatang. Upaya pemerintah Kota Gorontalo dalam melaksanakan pembangunannya, salah satunya dilaksanakan berdasarkan konsep otonomi daerah. Sehingga pemerintah dituntut untuk mampu melaksanakan pembangunannya secara maksimal. Namun demikian dalam hal melakukan pembangunan masih banyak yang harus dibenahi oleh pemerintah salah satunya dilihat dari sisi pendapatan dan pengawasan serta pelaksanaannya

masih bisa dikatakan lemah. Hal ini tentu berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat yang notabennya adalah pemberi kontribusi besar terhadap pendapatan daerah baik kontribusi finansial (pembayaran pajak dan retribusi) maupun kontribusi sosial.

Pajak daerah dan retribusi daerah di Kota Gorontalo, merupakan sumber penerimaan yang potensial, karena sampai pada bulan Desember tahun 2012 total pajak daerah dan retribusi daerah masing-masing adalah: Pajak Daerah Rp 24.181.643.393,00 retribusi daerah dari target penerimaan Rp 7.781.230.945,00 data ini diperoleh dari laporan realisasi penerimaan pendapatan Kota Gorontalo tahun 2012. Hal ini menunjukkan pajak daerah dan retribusi daerah sangat potensial memberi sumbangan dana bagi pendapatan asli daerah. Penerimaan pajak, retribusi daerah, dan PAD Kota Gorontalo selama enam tahun terakhir yaitu periode 2006-2012 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1: Rekapitulasi Realisasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Terhadap Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Gorontalo T.A 2006 s/d 2012 (Dalam Rupiah)

N O	TAHUN ANGGARAN	PENERIMAAN PAJAK DAERAH (Rp)	RETRIBUSI DAERAH (Rp)	PAD (RP)	Kontri busi (%)
1	2006	3.829.139.897,00	18.581.465.533,00	26.229.722.973,00	85
2	2007	5.500.279.077,00	23.499.959.536,00	35.053.377.209,00	82
3	2008	7.282.109.575,00	30.258.218.671,00	43.125.193.544,00	81
4	2009	9.327.067.162,00	28.602.216.399,00	53.590.516.884,00	71
5	2010	11.217.839.669,00	6.692.741.966,00	25.284.895.758,00	33
6	2011	17.931.672.329,00	7.070.722.069,00	31.636.441.135,00	27
7	2012	24.181.643.393,00	7.781.230.945,00	84.349.037.036,00	96

Sumber: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Gorontalo

Berdasarkan fenomena di atas dalam konteks otonomi daerah, semestinya kemampuan untuk menyelenggarakan otonomi tersebut harusnya ditunjukkan dengan tingkat Pendapatan Asli Daerah yang jelas tercermin pada seberapa besar penerimaan pendapatan yang diperoleh daerah itu sendiri. Tabel di atas menunjukkan keadaan sisi pendapatan di Kota Gorontalo masih fluktuatif dan ini menyebabkan ketidakseimbangan pembangunan ekonomi di Kota Gorontalo. Sehubungan dengan hal itu, potensi-potensi yang ada di Kota Gorontalo seharusnya bisa dimaksimalkan lagi untuk menambah sumber penerimaan yang diterima oleh daerah. Tujuan adanya peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah adalah untuk mendorong perekonomian Kota Gorontalo melalui pembangunan sarana prasarana yang menunjang perekonomian. Dengan adanya pembangunan tersebut diharapkan perekonomian dapat berkembang dan tujuan akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat. Hal ini menjadi ketertarikan tersendiri bagi peneliti untuk melakukan penelitian sehubungan dengan “Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Gorontalo”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas, peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan keuangan daerah pemerintah Kota Gorontalo dalam hal pemungutan pajak dan retribusi daerah belum dilaksanakan dengan maksimal, hal ini tercermin dari jumlah tingakat pendapatan khususnya pendapatan asli daerah (PAD) Kota Gorontalo yang masih fluktuatif sehingga dapat diidentifikasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah belum dilaksanakan dengan optimal.

2. Penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang belum maksimal, menyebabkan lemahnya tingkat pendapatan asli daerah di Kota Gorontalo sehingga jumlah pendapatannyapun masih rendah.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah penerimaan pajak daerah berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Gorontalo?
2. Apakah penerimaan retribusi daerah berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Gorontalo?
3. Apakah penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh secara bersama-sama terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Gorontalo.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh penerimaan pajak daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Gorontalo.
2. Untuk mengetahui pengaruh penerimaan retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Gorontalo.
3. Untuk mengetahui pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Gorontalo.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk perkembangan ilmu akuntansi, khususnya yang berkaitan dengan penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah. Disamping itu, diharapkan pula dapat menjadi referensi untuk penelitian skripsi di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah khususnya daerah Kota Gorontalo dan dapat dijadikan sebagai acuan dalam hal pembuatan kebijakan tentang pajak dan retribusi daerah dalam peningkatan pendapatan asli daerah.